

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, FLYPAPER EFFECT, DANA BAGI  
HASIL DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP NILAI  
OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN**

**(Tesis)**

**Oleh**

**SYAHRUDHIN WIDHYARTA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, *FLYPAPER EFFECT*,  
DANA BAGI HASIL DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
TERHADAP NILAI OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN**

**Oleh**

**SYAHRUDHIN WIDHYARTA**

**ABSTRAK**

Penyusunan APBD adalah salah satu gambaran kontrak antara DPRD sebagai principal, dengan Pemerintah Daerah sebagai agent. Dalam kontrak tersebut, terdapat oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, dimana ada upaya untuk memanfaatkan peluang agar kepentingan pribadi ataupun kelompok dapat diakomodir daalam APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji dan menganalisa : pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera, Pengaruh Flypaper Effect terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera, Pengaruh DBH terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera, dan Pengaruh SILPA terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh APBD Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera periode 2013-2015. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis dat panel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Flypaper Effect, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera, dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera

Kata kunci : PAD, Flypaper Effect, DBH, dan SiLPA, Oportunistik Penyusun Anggaran.

**THE INFLUENCE OF PAD, FLYPAPER EFFECT, DBH AND SILPA ON  
OPORTUNISTIC VALUE OF BUDGETING**

**By**

**SYAHFRUDHIN WIDHYARTA**

**ABSTRACK**

*APBD arrangement is one of the contract description between DPRD as principal, with Local Government as agent. In the contract, there is an opportunistic in the budgeting process, where there is an effort to exploit the opportunity for personal or group interests to be accommodated in the APBD.*

*This study aims to examine and analyze: the influence of PAD on the value of opportunistic budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island, the influence of Flypaper Effect on the value of opportunistic budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island, the influence of DBH on the value of opportunistic budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island, and the influence of SILPA on the value of opportunistic budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island. The data used is secondary data. The population in this study is all APBD of Regencies / Cities in Sumatera Island period 2013-2015. Analyzer used is data panel analysis method.*

*The results of this study indicate that PAD, Flypaper Effect, DBH have positive and significant effect on the opportunistic value of budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island, and SiLPA has no effect on the opportunistic value of budgeting of Regencies / Cities in Sumatera Island*

*Keywords: PAD, Flypaper Effect, DBH, and SiLPA, Opportunistic value of Budgeting*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, FLYPAPER EFFECT, DANA BAGI  
HASIL DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP NILAI  
OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN**

**Oleh**

**SYAHFRUDHIN WIDHYARTA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Tesis : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
FLYPAPER EFFECT, DANA BAGI HASIL,  
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
TERHADAP NILAI OPORTUNISTIK  
PENYUSUN ANGGARAN**

Nama Mahasiswa : **SYAHRUDHIN WIDHYARTA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1521031039

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



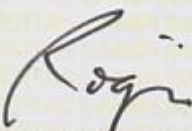
Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., C.A., C.P.A.**  
NIP 19550503 198603 1 002


**Yuhansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**  
NIP 19730723 199903 1 002


Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., C.A., C.P.A. 

Sekretaris : Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. 

Penguji Utama : Dr. Nairobi, S.E., M.Si. 

Sekretaris Penguji : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.  
NIP. 196109041987031011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.  
NIP. 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 5 Desember 2017

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAHFRUDHIN WIDHYARTA

NPM : 1521031039

Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandar Lampung, 05 Desember 2017



Yang membuat pernyataan,

Syahfrudhin Widhyarta

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 24 November 1980 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Sulurudin dan Ibu Luh Putu Widhyarti (alm).

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 1 Iring Mulyo dan lulus pada tahun 1993, SMP Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 1996 dan SMU BOPKRI 1 Yogyakarta dan lulus pada tahun 1999. Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program Manajemen Pembangunan Daerah Sekolah Tinggi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA LAN RI) Bandung dan lulus pada tahun 2008.

Peneliti diangkat dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2000 dan kemudian ditahun 2015, menjadi Mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung dengan status Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada program beasiswa *State Accountability Revitalization (STAR) Project* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



## MOTTO

Selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT berikan

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"Maka nikmat Rabb-kamu yang manakah, yang kamu dustakan;"  
(QS.Ar-rahman:13)

## PERSEMBAHAN

Tesis yang belum sempurna ini saya persembahkan kepada

ibu tercinta Sari Ulyati, S.Si, Pahlawan Kecilku Rayyan Aulia Widhyananda dan Hanif  
Widhyanararya, terima kasih atas dukungan, pengertian, doa yang diberikan selama ini.

Kepada orang tua ku, Bapak Sulurudin, Ibu Luh Putu Widhyarti (alm), Ibu Ummi Amidah,  
Ayah Ubaidillah, Umak Hayati Hasyim (alm), dan Ibu Masrinah, dan saudara-saudaraku  
yang tercinta, terima kasih atas nasihat, dukungan dan doa yang diberikan selama ini

1. Bapak Prof. Dr. H. Saiful Bangsan, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Rinda Riko Cahaya, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,  
selain sebagai Dosen Sekretaris Pengaji, atas segala bimbingan, motivasi dan  
kebersihan yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. Nugroho, S.E., M.M., AIC, C.A.C.P.A selaku Dosen Pembimbing  
Utama, atas segala bimbingan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat membantu  
dalam proses penyusunan tesis ini.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahillahi robbil'alamiin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT limpahkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan terbaik di muka bumi ini, Muhammad SAW, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Flypaper Effect*, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Nilai Opportunistik Penyusun Anggaran**" merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu peneliti membuka saran, masukan, dan kritikan yang dapat digunakan untuk memperbaiki riset ini untuk riset berikutnya. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Sekretaris Penguji, atas segala diskusi, motivasi dan kesabaran yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., C.A., C.P.A selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala masukan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat membantu selama proses penyusunan tesis ini;

4. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala masukan, saran, motivasi dan ilmu yang sangat membantu selama proses penyusunan tesis ini
5. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama, atas segala saran dan masukan yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang selama masa pendidikan telah memberikan ilmu dan berbagai pengalaman yang sangat berharga.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai penyelenggara beasiswa *State Accountability Revitalization (STAR) Project*, yang telah memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan selama pendidikan.
8. Pengelola dan karyawan serta karyawan MIA UNILA, mas Andre, Mbak Lenny, dan Bro Nico yang telah ikut membantu kelancaran pendidikan.
9. Bapakku Sulurudin yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan senantiasa mendoakan anak-anaknya, dan untuk Ibuku yang sangat kurindukan, Luh Putu Widhyarti (alm), *al fatihah* dan doa selalu untukmu.
10. Ayahku Ubaidillah, dan Ibu Masrinah yang selalu memberiku nasehat, dukungan dan doa selama masa pendidikan, dan untuk umak Hayati binti Hasyim, *al fatihah* dan doa selalu untukmu
11. Istriku yang sangat kusayangi, Sari Ulyati, S.Si dan dua pahlawan kecilku, Rayyan Aulia Widhyananda dan Hanif Adry Widhyanararya, yang selalu menemani dan menyemangati selama masa pendidikan, *baarakallaah fiikum*.
12. Babak Agus Widhyajudhin, Mamak Sadu Fitriyani, kakak-kakak dan adik-adikku yang kucintai.

13. Teman-teman seperjuangan STAR BPKP Batch III MIA UNILA: Pak Wasis, Mas Hayatul Islam, Mas Didik, Mas Ratno, Mas Mufid, Mas Damar, Mas Heru, Mas Anggi, Mas Wahono, Mbak Karlina, Mbak Atikah, Mbak Dewi, Mbak Erna, Mbak Fitri, dan Mbak Yeyen serta teman-teman STAR BPKP Batch I dan II MIA UNILA dan teman-teman Mahasiswa Reguler MIA UNILA angkatan 2015, atas kerjasama juga kebersamaan selama ini dan semangat yang selalu kalian berikan;
14. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Keluarga Besar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Bandar Lampung, 05 Desember 2017

Peneliti,

Syahfrudhin Widhyarta

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Keagenan .....	13
2.2. Oportunistik pada Penyusunan Anggaran.....	14
2.3. Pendapatan Asli Daerah .....	16
2.4. <i>Flypaper Effect</i> .....	17
2.5. Dana Bagi Hasil .....	18
2.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .....	18
2.7. Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	20
2.8. Pengembangan Hipotesa.....	23
2.8.1. Kerangka Berpikir.....	23
2.8.2. Kerangka Konsep Penelitian.....	26
2.8.3. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Penentuan Sumber Data.....	31
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.3. Definisi dan Operasional Variabel.....	32
3.3.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	32
3.3.2. Variabel Bebas (Variabel Independen) .....	33
3.4. Metode Analisis .....	36
3.4.1. Model. Estimasi .....	36
3.4.1.1. Common Effect Model .....	37
3.4.1.2. Fixed Effect Model .....	37
3.4.1.3. Random Effect Model.....	37
3.4.2. Estimasi Regresi Data Panel .....	38
3.4.3. Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis.....	40
3.4.3.1. Uji Chow .....	40
3.4.3.2. Uji Hausman.....	41
3.4.3.3. Uji Lagrange Multiplier .....	42
3.4.3.4. Uji Statistik F.....	42

3.4.3.5. Uji Statistik T.....	43
<b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Gambaran Umum APBD Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera .....	44
4.2. Deskripsi Statistik .....	45
4.3. Pemilihan Teknik Regresi Estimasi Data Panel .....	49
4.3.1. Uji Chow.....	50
4.3.2. Uji Hausman .....	51
4.3.3. Penentuan Model Terpilih .....	51
4.4. Analisis Hasil Data Panel .....	52
4.4.1. Hasil Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	54
4.4.2. Hasil Uji F .....	55
4.4.3. Hasil Uji t .....	55
4.5. PEMBAHASAN .....	57
4.5.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap nilai Oportunistik Penyusun Anggaran.....	57
4.5.2. Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Nilai oportunistik Oportunistik Penyusun Anggaran .....	59
4.5.3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Nilai Oportunistik Penyusun Anggaran .....	62
4.5.4. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Nilai Oportunistik Penyusun Anggaran .....	64
4.5.5. <i>Individu Effect</i> pada Model Regresi <i>Fixed Effect</i> .....	67
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1. Simpulan.....	69
5.2. Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

1.1.	Kondisi PAD, SILPA, DAU dan DBH Kabupaten/Kota Se Sumatera Periode 2013-2015 .....	6
1.2.	Kondisi Permasalahan Ketidapatuhan Kabupate/Kota se-Sumatera Periode 2013-2015 .....	7
1.3.	Kasus Korupsi/Suap Pembahasan APBD di Pulau Sumatera .....	8
4.1.	Deskripsi Statistik .....	44
4.2.	Hasil Uji Chow .....	49
4.3.	Hasil Uji Hausman .....	49
4.4.	Hasil Model <i>Fixed Effect</i> .....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam hal pengelolaan pembangunan dan keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran. Setiap daerah diwajibkan untuk membuat suatu rencana atau rancangan keuangan daerah yang biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan perancangan APBD ini adalah agar pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini haruslah terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan ataupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan rakyat, penataan ruang,

perlindungan lingkungan hidup dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bila ditinjau dari teori keagenan, proses penyusunan APBD adalah gambaran dari kontrak antara *principal* dan *agents*. DPRD sebagai wakil masyarakat yang telah memilihnya (*voters*), bertindak sebagai *principal*, diberikan kuasa untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD (Andvig *et al*,2001). Dan pihak eksekutif selaku agen dari kontrak tersebut, diharapkan dapat mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat (Halim dan Abdullah, 2006; Latifah, 2010; Abdullah, 2012).

Dampak dari penerapan teori keagenan dalam proses penyusunan anggaran adalah hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya oportunistik (Latifah, 2010). Adanya kondisi asimetri informasi antara eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan pemilih, menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya oportunistik dalam proses penyusunan anggaran (Halim dan Abdullah, 2006; Bartolini *and* Santolini, 2007; Maria, 2009; Sularso, 2014).

Permasalahan yang sering muncul pada saat penyusunan anggaran adalah ketika pihak– pihak yang terlibat, berupaya untuk memanfaatkan peluang guna kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD (Suryarini, 2012). Kebijakan anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi

masyarakat, maupun rakyat kecil (Sujaie, 2013). Beberapa modus oportunistik yang sering terjadi, diantaranya menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan politik dan kepentingan individu, mengusulkan proyek-proyek tertentu yang dapat memberikan keuntungan salah satu pihak dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi *fee project* yang cukup besar (Jumaidi, 2014).

Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Kondisi *powerfull* yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang “lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan *outcome* anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik.

Seringkali alokasi sumberdaya dalam proses penganggaran mengalami distorsi, disaat penyusun anggaran berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu pada kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi (Mauro, 1998a;

1998b) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi (Keefer & Khemani, 2003). Artinya, korupsi dan kegiatan pencarian keuntungan di lingkungan pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran daerah baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan didanai dari Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah serta penerimaan pembiayaan. Pada penelitian terdahulu (Abdullah, 2012; Maryono, 2013; Sularso dkk., 2014) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap oportunistik penyusun anggaran.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat (Oktriniatmaja, 2011). Pihak Legislatif biasanya akan mendorong pihak eksekutif untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang mendukung kepentingannya (Sularso, 2014). Dengan meningkatnya jumlah PAD, maka akan memberi kesempatan bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan dana yang lebih besar pada belanja sektor tertentu sesuai preferensinya.

Adapun sumber pendapatan lain yang digunakan dalam membiayai belanja daerah adalah Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah dengan maksud agar tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU cukup fleksibel dan tidak terikat pada program/kegiatan tertentu, sehingga penyusun anggaran dapat memanfaatkan kondisi ini dengan mengusulkan kegiatan yang memberikan *self-interest-nya* (Maryono, 2013).

SILPA adalah sisa lebih tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan yang merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA adalah untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya dan untuk membiayai kegiatan baru yang tidak dianggarkan dalam APBD murni

SILPA sebagai penerimaan pembiayaan, dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran dalam APBD. SILPA diketahui secara pasti setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan. Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif dan eksekutif untuk mengalokasikan kembali (*rebudgeting*) dana tersebut melalui mekanisme perubahan APBD (Asmara,

2010) serta memberi ruang bagi penyusun anggaran untuk melakukan oportunistik dalam mengalokasikan SILPA tersebut (Sularso dkk, 2014).

Adapun kondisi Anggaran Pendapatan dalam APBD Kabupaten/Kota se Sumatera, dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana tergambar dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Kondisi PAD, SiLPA, DAU dan DBH Kabupaten/Kota  
se Sumatera Periode 2013-2015  
(dalam milyar rupiah)

<b>TAHUN</b>	<b>PAD</b>	<b>SILPA</b>	<b>DAU</b>	<b>DBH</b>
2013	11.128,56	17.848,52	75.818,12	28.462,41
2014	12.953,75	14.097,85	81.913,04	29.328,36
2015	16.949,08	14.173,99	84.127,81	26.743,90
jumlah	41.031,40	46.120,37	241.858,98	84.534,68
Prosentase nasional	21.01%	26.99%	26.64%	8.27%
rata-rata se- sumatera	4.103,14	4.612,03	24.185,89	8.453,46
rata-rata nasional	8.170,82	7.688,30	41.043,89	48.732,19

Sumber : BPK RI (*data diolah*)

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata PAD, SiLPA, DAU dan DBH Kabupaten/Kota se Sumatera masih berada dibawah rata-rata nasional. Namun bukan berarti bahwa peluang korupsi APBD di Pulau Sumatera relatif rendah atau sedikit bila dibandingkan dengan korupsi APBD secara nasional.

Hal tersebut selaras dengan data hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Dari

hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, menunjukkan permasalahan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah yang meliputi permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan daerah, serta permasalahan yang tidak berdampak finansial yaitu administrasi.

Adapun data hasil pemeriksaan BPK RI untuk regional Sumatera dari tahun 2013-2015 yang memberikan gambaran permasalahan ketidakpatuhan, sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Kondisi permasalahan ketidakpatuhan se Sumatera  
Periode 2013-2015 (dalam milyar rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jumlah regional sumatera	583,85	504,83	600,67
Jumlah Nasional	2.178,07	436,90	2.522,79
Persentase	23,02	20,72	23,81

Sumber : *BPK RI* (data diolah)

Dari kondisi sebagaimana pada Tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat permasalahan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera berada pada kisaran 20% dari total keseluruhan permasalahan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional. Permasalahan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan indikasi awal adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tersebut.

Praktik korupsi APBD juga terjadi pada saat pembahasan rancangan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, dimana sering terjadi praktik suap menyuap antara eksekutif dan legislatif, dengan tujuan agar pengesahan RAPBD segera terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Hal tersebut sebagaimana dilansir



oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman beritanya, bahwa di Pulau Sumatera setidaknya terjadi beberapa kasus korupsi yang terjadi pada saat penyusunan dan pembahasan anggaran, yaitu yang ditandai dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan oleh KPK terhadap beberapa pejabat eksekutif dan legislatif daerah terkait dengan pembahasan RAPBD. Adapun kasus korupsi tersebut sebagaimana disebut dalam Tabel berikut :

Tabel 1.3  
Kasus Korupsi/Suap Pembahasan APBD di Pulau Sumatera

No.	Kasus	Subjek	Nilai
1.	Penyusunan APBD Propinsi Sumatera Utara TA. 2012-2015	Gubernur Sumatera Utara dan beberapa anggota DPRD Prop. Sumut	Rp. 1.6 Milyar
2.	Pembahasan APBD Perubahan Propinsi Riau TA. 2014 dan RAPBD 2015	Gubernur Riau dan Anggota DPRD Propinsi Riau	Rp. 2 Milyar
3.	Pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2015	Bupati Musi Banyuasin beserta Istri, Kepala DPPKD dan Kepala Bappeda Kab. Muba dan beberapa anggota DPRD Kab. Muba	Rp. 2,56 Milyar
4.	Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAS PPAS) pada APBD Kab. Tanggamus tahun 2016.	Bupati Tanggamus	Rp. 523 juta

Sumber : *Berita KPK Republik Indonesia*

Disamping itu, masih terjadinya praktik ketidakkonsistenan sebuah perencanaan awal dengan dokumen akhir yang dihasilkan, turut memberikan celah bagi oportunistik penyusun anggaran dengan memasukkan kegiatan diluar perencanaan dengan jumlah anggaran yang sudah di *mark up*, tidak sesuai dengan standar

harga baku yang diberlakukan, dan manipulasi spesifikasi barang dan jasa. Dengan kata lain, dalam APBD masih membuka peluang terjadinya praktik anggaran program/kegiatan “siluman” atau titip menitip proyek yang akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh KPK, bahwa salah penyebab keadaan tersebut adalah karena sistem keuangan pemerintah daerah yang masih bersifat konvensional, lemahnya kendali atas anggaran yang telah ditetapkan, serta minimnya transparansi publik dalam mengetahui anggaran APBD. KPK juga menyebutkan bahwa sistem keuangan pemerintah daerah saat ini belum banyak yang menganut sistem keuangan yang mendokumentasikan penyusunan anggaran yang disimpan secara online dan bersifat terbuka bagi siapapun, sehingga bisa diakses secara langsung oleh masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Asmara (2006); Abdullah (2012); Oktriniatmaja (2011); Suryarini (2012); Sularso dkk (2014) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan SILPA berpengaruh positif terhadap oportunistik penyusun anggaran. Namun dalam penelitian Florensia (2009), dan Megasari (2014), menunjukkan perbedaan hasil penelitian, dimana PAD dan SiLPA berpengaruh negatif terhadap oportunistik penyusun anggaran. Penelitian tentang oportunistik penyusun anggaran sebelumnya lebih fokus pada legislatif yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan politik dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infrastruktur dan belanja DPRD. Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang

merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif, peneliti tertarik untuk meneliti nilai oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak yang didasari adanya hubungan keagenan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah (2012); Suryarini (2012) dan Sularso dkk (2014). Pada penulisan ini penulis menambahkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel penelitian, mengingat DBH memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan APBD, dan juga fokus pada pengambilan data dari anggaran bidang urusan pendidikan, kesehatan, PU, dengan alasan jumlah dari ketiga alokasi tersebut paling besar dari total APBD bila dibandingkan dengan anggaran sektor lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk diteliti pengaruh PAD, DAU, DBH dan SILPA pada nilai oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota se-Pulau Sumatera.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Kecenderungan pengalokasian anggaran dalam jumlah besar untuk belanja daerah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, dapat menjadi cerminan adanya oportunistik penyusun anggaran. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan daerah, baik PAD, maupun dana transfer pemerintah pusat, serta penerimaan pembiayaan, yang berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja daerah, diduga turut pula mempengaruhi nilai oportunistik anggaran.

Bila pada penelitian tentang oportunistik penyusun anggaran sebelumnya, lebih fokus pada legislatif yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk

kepentingan politik dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infastruktur dan belanja DPRD. Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif, peneliti tertarik untuk meneliti oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak yang didasari adanya hubungan keagenan.

Sehingga dari uraian diatas, penulis berusaha merumuskan masalah penelitian, diantaranya yaitu:

- 1) Apakah terdapat pengaruh PAD pada nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera?
- 2) Apakah terdapat pengaruh *Flypaper Effect* pada nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera?
- 3) Apakah terdapat pengaruh DBH pada nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera?
- 4) Apakah terdapat pengaruh SiLPA pada nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, *Flypaper Effect*, DBH dan SiLPA pada Oportunistik Penyusun anggaran di Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua golongan baik secara teoritis dan praktik seperti berikut:

1) Manfaat Teoretis.

Dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh PAD, *Flypaper Effect*, DBH dan SiLPA, pada Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

2) Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pihak eksekutif maupun legislatif dalam proses penyusunan APBD, dan dari penelitian ini juga, diharapkan adanya peningkatan pengawasan pada proses penyusunan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Pada teori keagenan dijelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dengan agen, yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan memberikan gambaran mengenai susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Dalam teori tersebut, terdapat satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Fokus dalam teori keagenan adalah pada persoalan asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuan yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien.

Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, menimbulkan perspektif aplikasi teori keagenan yaitu hubungan antara legislatif (*principal*) dan eksekutif (*agent*) (Halim dan Abdullah, 2006). Kerangka kerja *Principal-agent* dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam menganalisis komitmen kebijakan publik, karena pembuatan dan pengimplementasiannya melibatkan persoalan

kontraktual yang berkaitan dengan asimetri informasi, moral hazard, dan adverse selection

Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran. Perilaku oportunistik adalah dampak negatif dari teori keagenan tersebut.

Dalam organisasi sektor publik, perilaku seperti ini akan muncul di kalangan legislatif dan eksekutif. Hal tersebut ditunjukkan melalui besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. Kekuatan yang dimiliki oleh legislatif mengakibatkan eksekutif berada di bawah tekanan yang semakin besar, tekanan semacam ini mengakibatkan terdistorsinya outcome anggaran dalam bentuk pengalokasian sumber daya untuk publik yang tidak tepat sasaran. Namun, disisi lainpun, pihak eksekutif sebenarnya lebih banyak mengetahui informasi tentang program kegiatan yang akan dijalankan, dan cenderung lebih memahami peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Oportunistik pada Penyusunan Anggaran**

Oportunistik merupakan upaya mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun (Havid, 2014). Faktor yang mempengaruhi oportunistik adalah kekuatan (power) dan kemampuan (ability) (Maryono, sebagaimana dikutip dalam Havid,dkk:2014). Selanjutnya, Martinez-Vasquez et al. (2006) menyatakan bahwa *political corruption* terjadi ketika politisi atau birokrat tingkat

atas memanfaatkan kedudukan mereka demi keuntungan pribadi, ataupun kalangan dekat mereka. Misalnya, dengan mengalokasikan belanja untuk barang-barang khusus dan berteknologi tinggi karena merupakan belanja yang mudah dikorupsi sebab tidak banyak orang yang memahami barang tersebut, dan menghindari belanja untuk pendidikan dan kesehatan, karena belanja pendidikan dan kesehatan bukanlah area yang dapat memberikan peluang untuk korupsi, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan akan diperkecil (Mauro, 1998).

Selanjutnya Tanzi *and* Davoodi (2002) mengemukakan bahwa legislatif lebih menyukai belanja investasi publik, karena dapat memberikan komisi yang lebih besar daripada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Keefer and Khemani (2003), mengemukakan bahwa pengalokasian anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji legislatif kepada pemilihnya. Legislatif akan merekomendasikan eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya dan mengusulkan pengurangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*

Dari beberapa pendapat diatas, oportunistik dapat dikatakan yaitu upaya memanfaatkan kesempatan yang ada, sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya, untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya ditujukan bagi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat di daerah, justru dalam prakteknya, program yang ditetapkan berdasarkan



kepentingan masing-masing pejabat (dalam hal ini eksekutif dan legislatif). Dengan kata lain, dengan menggunakan jabatan yang dipegangnya, maka baik eksekutif maupun legislatif akan berusaha memasukkan kepentingannya sendiri dalam penentuan anggaran yang dilakukan.

### **2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana, yang digunakan sebagai pendanaan keperluan daerah bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sementara Darise (2009) mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD itu sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai baik secara keseluruhan maupun sebagian beban belanja yang diperlukan, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Menurut Bastian (2006), Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bersumber dari : 1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah. 2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat. 4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok di atas.

#### **2.4. Flypaper Effect**

*Flypaper Effect* adalah suatu keadaan yang terjadi dimana pemerintah daerah melaksanakan belanja dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006). Tresch (2002) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat.

Dengan demikian, dapat dikatakan *flypaper effect* adalah suatu fenomena ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya secara lebih banyak yang berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau

*unconditional grants* dibandingkan dengan menggunakan pendapatan asli dari daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Fenomena *fypaper effect* membawa dampak lebih luas bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintahan daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998).

### **2.5. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pendanaannya bersumber dari pendapatan APBN dengan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai hasil dari transfer pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, yang berasal dari Penerimaan Negara atas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Dalam Negeri atas PPh menurut Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas Pemungutan/Pemotongan Penghasilan Wajib Pajak menurut Pasal 21 UU PPh, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)

### **2.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Sisa anggaran merupakan dana yang dimiliki oleh pemda, yang tidak terpakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun

anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai.

SiLPA ada sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SiLPA tahun anggaran 2011. Sedangkan SiLPA dalam APBD 2012 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2012, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Adapun cakupan SiLPA diantaranya pelampauan realisasi PAD dari yang ditargetkan, pelampauan penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, efisiensi pada belanja daerah, belum diselesaikannya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selanjutnya, SiLPA menjadi indikator efisiensi belanja pemerintah.

## 2.7 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan meneliti mengenai pengaruh PAD, SiLPA, *Flypaper Effect*, dan Dana Bagi Hasil pada oportunistik penyusun anggaran, antara lain:

- a. Mauro (1998) mengemukakan bahwa belanja untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah area yang dapat memberikan peluang untuk korupsi, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan akan diperkecil, dan belanja barang untuk program/kegiatan yang sulit dimonitor orang lain akan memberikan peluang terjadinya oportunistik.
- b. Tanzi and Davoodi (2002) mengemukakan bahwa belanja investasi publik lebih disukai legislatif karena memberikan komisi lebih besar daripada belanja pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kata lain, preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja dapat memberikan keuntungan pribadi lebih besar dan memiliki dampak politik jangka panjang.
- c. Keefer and Khemani (2003), mengemukakan bahwa pengalokasian anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji legislatif kepada pemilihnya. Legislatif akan merekomendasikan eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya dan mengusulkan pengurangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*

- d. Abdullah dan Asmara (2006) menyatakan bahwa legislatif berperilaku oportunistik dalam pengalokasian sumber daya di anggaran belanja, dan perubahan PAD berpengaruh positif terhadap oportunistik legislatif.
- e. Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.
- f. Bartolini and Santolini (2007) mengungkapkan bahwa adanya oportunistik *incumbent politicians* dalam memodifikasi belanja untuk meningkatkan peluang agar terpilih kembali.
- g. Latifah (2010) mengungkapkan Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya oportunistik dalam proses penyusunan anggaran.
- h. Riharjo dan Isnadi (2010) mengemukakan bahwa oportunistik pejabat eksekutif mendorong pengaruh belanja pegawai dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap meningkatnya *slack* anggaran
- i. Sujaie (2013) menegaskan bahwa oportunistik perumus kebijakan anggaran dalam penyusunan kebijakan APBD terjadi pada penetapan target pendapatan, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

- j. Sularso dkk. (2014) mengungkapkan bahwa semakin besar PAD maka semakin besar oportunistik penyusun anggaran, semakin besar SILPA semakin besar OPA dan semakin besar DAU semakin besar
- k. Sholikhah (2014) mengungkapkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAU mempunyai arah negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
- l. Havid (2014) mengungkapkan bahwa semakin besar jumlah PAD yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka akan semakin besar oportunistik penyusun anggaran, semakin besar jumlah SiLPA dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka akan semakin besar oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar jumlah DAU yang diterima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka akan semakin besar oportunistik penyusun anggaran. Penelitian menggunakan variabel DAU, PAD, SiLPA dan Perilaku Oportunistik
- m. Megasari (2015) mengungkapkan bahwa Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif pada Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif pada Oportunistik Penyusun Anggaran

Kabupaten/Kota di Bali, Flypaper Effect berpengaruh negatif pada Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali.

## 2.8. Pengembangan Hipotesa

### 2.8.1. Kerangka berpikir

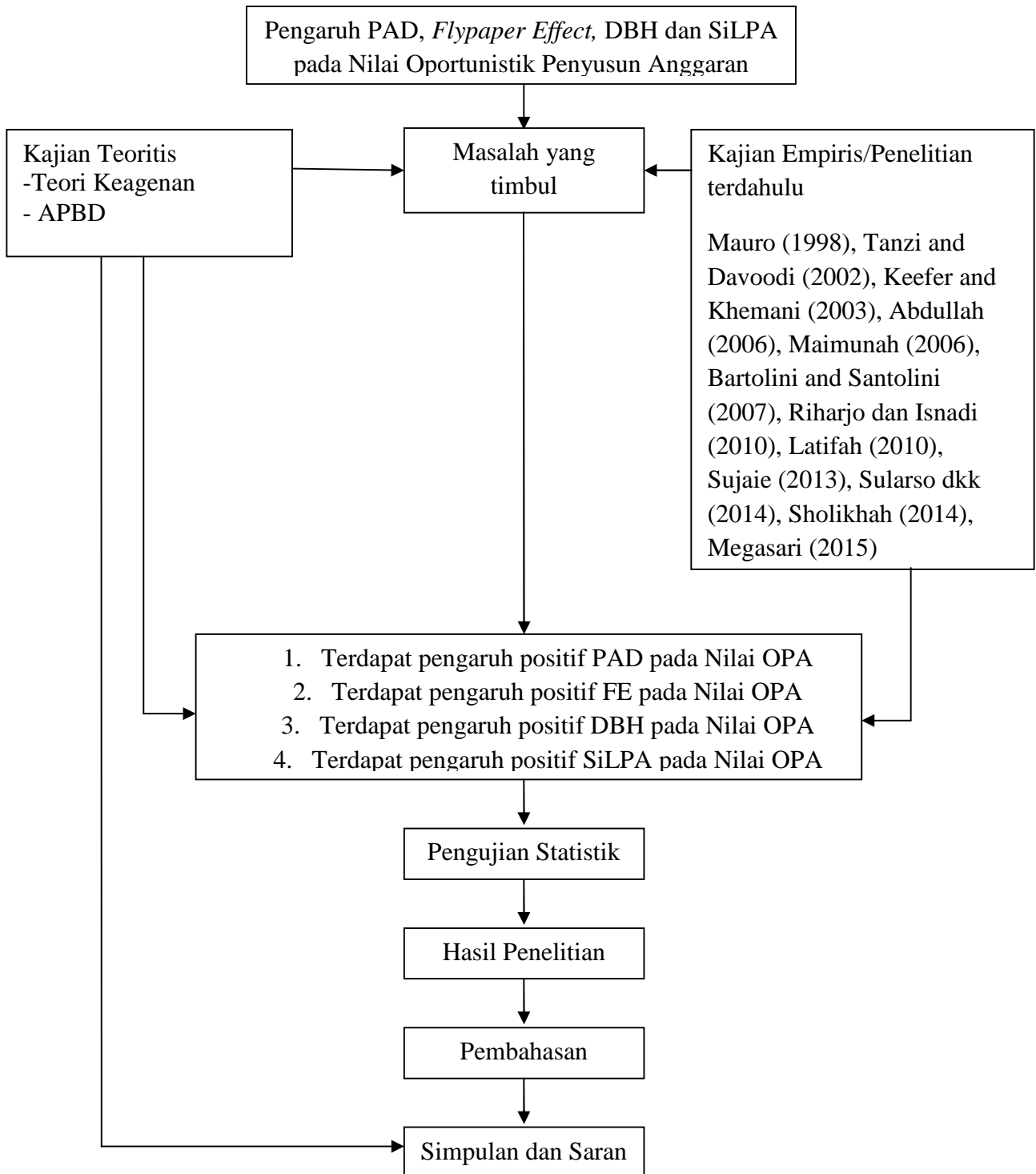
Secara konseptual perubahan pendapatan dalam APBD akan berpengaruh terhadap belanja. Perubahan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap oportunistik legislatif (Abdullah dan Asmara, 2006; Maria, 2009).

Sumber pendapatan daerah berupa DAU dan DBH adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dan DBH memiliki proporsi yang besar pada penerimaan daerah, dimana pemerintah daerah dapat secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan juga halnya dengan SiLPA, yang merupakan dana *idle* dari kelebihan anggaran pada tahun lalu, yang dapat dijadikan penerimaan pembiayaan. Keleluasaan tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya oportunistik baik pada legislatif maupun eksekutif. Maryono (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dana alokasi umum dengan oportunistik penyusun anggaran.

Oportunistik anggaran (*fiscal opportunism*), yaitu perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi (Romarina dan Makfatih,



2010). Fenomena oportunistik penyusun anggaran dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas utama. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar berikut.

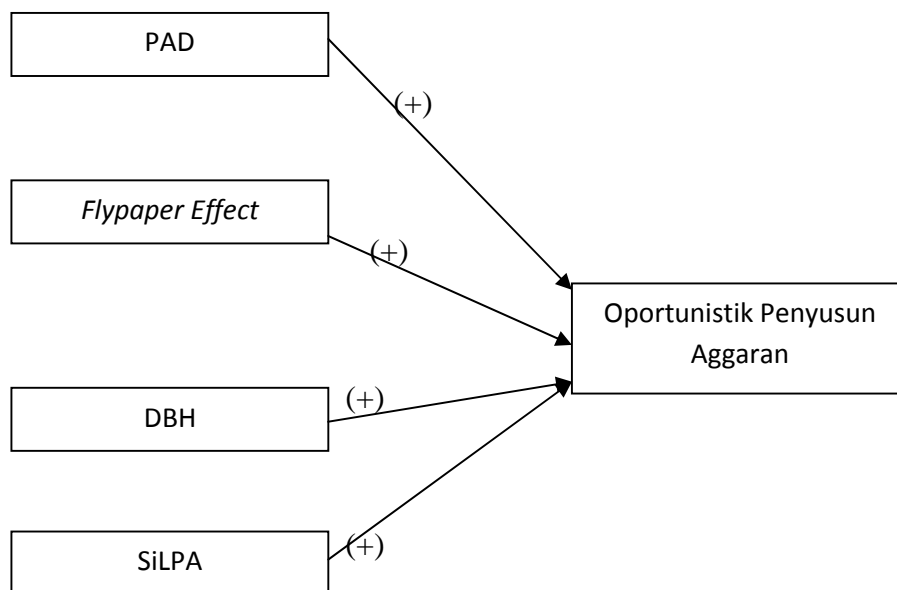


Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

### 2.8.2. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian dan penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen digambarkan sebagai berikut :



### 2.8.3. Hipotesis Penelitian

Opportunistik terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat pada penyusunan anggaran lebih mengutamakan *self interest*-nya sehingga menimbulkan korupsi yang merugikan kepentingan umum (Mauro, 1998).

Dalam penelitian Abdullah (2012) dikemukakan adanya perbedaan preferensi antara legislatif dan eksekutif dalam pengalokasian *spread* PAD kedalam belanja

sektoral. Alokasi untuk belanja infrastruktur dan DPRD mengalami peningkatan, namun alokasi untuk belanja pendidikan dan kesehatan mengalami penurunan. Abdullah (2012) juga mengemukakan bahwa *power* legislatif yang sangat besar menimbulkan diskresi atas penggunaan PAD yang tidak sesuai dengan preferensi masyarakat. Pada penelitian Sularso (2014) serta Abdullah dan Asmara (2006) menunjukkan bahwa semakin besar PAD, maka oportunistik penyusun anggaran akan semakin besar.

Berdasarkan logika dari tinjauan paparan diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1** : PAD berpengaruh positif terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

*Flypaper effect* adalah suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang lebih banyak membelanjakan atau lebih boros menggunakan dana DAU daripada menggunakan dana sendiri atau PAD. *Flypaper Effect* dapat terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih dan memberikan keuntungan bagi para penyusun anggaran. Implikasi lain *flypaper effect* yaitu berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, dimana transfer (*grants*) untuk pemerintah daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah (Shah,2006). Penjelasan dari dampak ini disebutkan

bahwa para birokrat berusaha untuk memaksimalkan anggaran karena dengan melakukan hal tersebut akan membuat mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di masyarakat (Shah, 2006).

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.

Berdasarkan logika dari tinjauan paparan diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H2** : *Flypaper Effect* berpengaruh positif terhadap nilai oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

DBH adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri, baik yang berasal dari pajak maupun sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. DBH yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dapat digunakan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, hal tersebut tidak lepas dari prinsip DBH yaitu apa yang sudah diambil dari daerah, akan dikembalikan lagi ke daerah tersebut untuk mendukung proses pembangunan di daerah.

Dalam penelitian Wandira (2013) dan Sholikhah (2014), menyatakan bahwa DBH mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja. Dalam hal suatu daerah mendapatkan transfer DBH yang cukup tinggi, akan cenderung memiliki

keleluasaan alokasi Belanja yang cukup tinggi pula, dan kondisi tersebut turut mempengaruhi perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran pula.

Berdasarkan logika dari tinjauan paparan diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3** : DBH berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Dalam studi Mauro (1998) menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah berupa belanja barang atau pelayanan untuk program/kegiatan yang sulit untuk diawasi orang lain, dapat membuka peluang terjadinya oportunistik. Penelitian Tanzi *and* Davoodi (2002) juga mengemukakan bahwa pengeluaran investasi publik cenderung lebih disukai karena dapat memberikan komisi lebih besar daripada pengeluaran dibidang pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun dalam pelaksanaan belanja pemerintah, umumnya tidak selalu dapat terealisasi secara penuh pada tahun anggaran berjalan, sehingga kemudian membentuk SiLPA. SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada pengalokasi APBD periode selanjut (Sularso dkk,2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa SiLPA berpengaruh positif pada alokasi belanja pada tahun berikutnya sehingga hal ini memberi peluang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan *free cashflow* tersebut untuk berperilaku oportunistik.

Berdasarkan logika dari tinjauan paparan diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H4:** SiLPA berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

#### **3.1. Penentuan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain dalam bentuk laporan keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tentang APBD Kabupaten/Kota tahun 2013 – 2015 se-Pulau Sumatera. Populasi yang digunakan adalah seluruh APBD Kabupaten/Kota se- Pulau Sumatera untuk kurun waktu 2013 – 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (sensus) dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel.

#### **3.2. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruang lingkup penelitian adalah perilaku oportunistik penyusun anggaran yang dilihat dari alokasi pendapatan yang disusun dalam APBD Kabupaten/Kota se-



Sumatera yang dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH, dan SiLPA serta alokasi belanja yang diamati yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

### 3.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

#### 3.3.1. Variabel Terikat (Variabel dependen)

Variabel terikat adalah variabel utama yang menjadi perhatian utama oleh peneliti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA).

OPA menunjukkan adanya perubahan (*spread*) pada alokasi anggaran belanja tertentu dari APBD tahun sebelumnya ke APBD tahun berjalan. Adapun *spread* tersebut terjadi karena perbedaan preferensi dalam pengalokasian sumberdaya antara *principal* dan *agent* (Abdullah,2012). Nilai OPA menunjukkan adanya perilaku penyusun anggaran yang memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mempengaruhi kebijakan pengalokasian anggaran sesuai dengan preferensi diri atau kelompoknya, sehingga nilai OPA menggambarkan besaran self-interest penyusun anggaran (Abdullah,2012)

Pengukuran OPA dikembangkan dari penelitian Abdullah (2012), yang sebelumnya diturunkan dari pemahaman yang digali dari studi sebelumnya yaitu Keefer *and* Khemani, 2003, Tanzi *and* Davoodi, 2002, Mauro, 1998 dengan tahapan pengukuran sebagai berikut:

1). Menghitung spread alokasi anggaran belanja dari APBD tahun berjalan ke tahun sebelumnya. Perhitungan spread ( ) =  $APBD_{\text{tahun berjalan (t)}} - APBD_{\text{tahun sebelumnya(t-1)}}$ . Adapun sektor yang diamati adalah spread ( ) pendidikan, spread ( ) kesehatan, dan spread ( ) pekerjaan umum.

a). *Pdk* yaitu penurunan alokasi untuk belanja pendidikan

a). *kes* yaitu penurunan alokasi untuk belanja kesehatan

a). *PU* yaitu kenaikan alokasi untuk belanja pekerjaan umum

Semua kenaikan dan penurunan alokasi tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah dan bertanda positif, namun jika yang terjadi sebaliknya atau tidak terjadi perubahan seperti diatas, maka diberi nilai 0 (nol)

2). Mengagregasikan atau menggabungkan spread yang menunjukkan OPA secara keseluruhan, dengan perhitungan  $OPA = ( )Pdk + ( )Kes + ( )PU$

### 3.3.2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya (Kuncoro, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Flypaper Effect (FE)*, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pemilihan variabel

bebas tersebut dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, keseluruhan variabel bebas mempunyai nilai cukup besar dalam menyumbang anggaran pendapatan daerah, dan Pemerintah Daerah dapat mengelola pendapatan tersebut, dengan tidak ada kriteria tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam pengalokasian kedalam belanja program/kegiatan, dan hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku oportunistik anggaran. Adapun penjabaran variabel bebas sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Bastian (2006), Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pengukuran PAD di dalam penelitian adalah perubahan PAD tahun berjalan dari PAD tahun sebelumnya, sehingga digunakan perhitungan sebagai berikut :

$PAD = spread \text{ PAD tahun berjalan (t) - PAD tahun sebelumnya (t-1)}$ .

#### 2. *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* adalah suatu keadaan yang terjadi dimana pemerintah daerah melaksanakan belanja dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD (Maimunah, 2006). Adapun

pengukuran dalam penelitian ini, *flypaper effect* diproksikan dengan DAU, adalah perubahan DAU tahun berjalan dari DAU tahun sebelumnya, sehingga digunakan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Flypaper Effect} = \text{spread DAU tahun berjalan (t)} - \text{DAU tahun sebelumnya (t-1)}$$

### 3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pendanaannya bersumber dari pendapatan APBN dengan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Adapun pengukuran DBH di dalam penelitian adalah perubahan DBH tahun berjalan dari DBH tahun sebelumnya, sehingga digunakan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{spread DBH tahun berjalan (t)} - \text{DBH tahun sebelumnya (t-1)}$$

### 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Adapun pengukuran SiLPA di dalam penelitian adalah perubahan SiLPA tahun berjalan dari SiLPA tahun sebelumnya, sehingga digunakan perhitungan sebagai berikut

$$\text{SiLPA} = \text{spread SiLPA tahun berjalan (t)} - \text{SiLPA tahun sebelumnya (t-1)}$$

### 3.4. Metode Analisis

Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang akan dianalisis adalah jenis data panel. Data panel digunakan karena dalam penelitian ini memiliki karakteristik data *cross section* dan *time series*, dan diharapkan dapat mengetahui dinamika perubahan dari kombinasi karakteristik data tersebut. Gurajati (2004) menjelaskan bahwa data panel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya (1) Teknik estimasi menggunakan data panel akan menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individu secara lebih spesifik, (2) mengkombinasikan pengamatan *time series* dan *cross section* akan memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antar variabel bebas, memberikan lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien, (3) data panel lebih cocok digunakan jika akan melakukan studi tentang perubahan dinamis, (4) data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data *time series* atau *cross section*, (5) Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks, (6), Data panel dapat meminimalkan bias.

Dalam penelitian ini, dibantu oleh Program Komputer Eviews 8.0 dengan beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

#### 3.4.1 Model Estimasi

Pada model regresi data panel, metode estimasi dapat dilaksanakan dengan cara melalui tiga pendekatan, antara lain:

#### **3.4.1.1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)**

*Common Effect Model* adalah salah satu pendekatan model pada data panel yang paling sederhana, dimana cukup dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini dimensi waktu maupun individu tidaklah diperhatikan, dengan demikian asumsi bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi model data panel (Gujarati & Porter, 2015).

#### **3.4.1.2. Fixed Effect Model (FE)**

Pada pendekatan model ini, diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan (Gujarati dan Porter, 2015). Dengan slop yang sama antar perusahaan. Pendekatan model estimasi ini disebut juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

#### **3.4.1.3. Random Effect Model (RE)**

Pendekatan model ini mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa variabel gangguan dapat saja saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam model *Random Effect*, perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan (Gujarati & Porter, 2015). Keuntungan dalam menerapkan model *Random Effect* yakni meniadakan heteroskedastisitas (Gujarati & Porter,

2015). Oleh karena itu, model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

### 3.4.2. Estimasi Regresi Data Panel

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

dimana:

$Y_{it}$  = variabel terikat (*dependent*)

$X_{it}$  = variabel bebas (*independent*)

$i$  = entitas ke- $i$

$t$  = periode ke- $t$

Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai konstanta ( $\alpha$ ) dan koefisien regresi ( $\beta_i$ ). Konstanta biasa disebut dengan intersep dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/ perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa

kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya.

- 1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan seluruh entitas/perusahaan. Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan (residual).
- 2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar entitas/perusahaan.
- 3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- 4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.
- 5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas muncullah berbagai kemungkinan model/teknik yang dapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering menjadi acuan dalam pembentukan model regresi data panel.

Dari penjelasan data panel diatas, berdasarkan penelitian Abdullah (2006) yang sebelumnya diturunkan dari pemahaman yang digali dari studi sebelumnya yaitu Keefer *and* Khemani (2003), Tanzi *and* Davoodi (2002), Mauro (1998), dimana dikemukakan bahwa Oportunitistik Penyusun Anggaran dipengaruhi oleh pendapatan APBD. Penelitian Abdullah kemudian didukung oleh penelitian selanjutnya yaitu Florensia (2009), Riharjo (2010), Kamaliah (2010), Sularso (2014), Purwati (2014), maka dapat dibangun suatu persamaan model regresi data panel sebagai berikut :



$$OPA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 FE_{it} + \alpha_3 DBH_{it} + \alpha_4 SiLPA_{it}$$

Keterangan :

$\alpha_0$	=Konstansta
$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$	= Koefisien Variabel Independen
OPA	= Oportunistik Penyusun Anggaran
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
FE	= <i>Flypaper Effect</i>
DBH	=Dana Bagi Hasil
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

### 3.4.3. Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis

Adapun dalam memilih model mana yang paling tepat, perlu dilakukan beberapa pengujian, antara lain:

#### 3.4.3.1. Uji Chow

Uji Chow berguna untuk mengetahui model mana yang lebih tepat dalam pengujian data panel, dapat dilakukan dengan menambahkan variabel *dummy* agar dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F (Gujarati & Porter, 2015).

Hipotesis nul dalam uji chow adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah bahwa intersep tidak sama, dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

Dalam pengujian Chow, apabila nilai Chi Square hitung lebih besar dari Chi Square kritisnya, maka hipotesis nul dapat ditolak, artinya bahwa model yang paling tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square kritis, maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

#### **3.4.3.2 Uji Hausman**

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Namun, metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

#### **3.4.3.3. Uji Lagrange Multiplier**

Uji *Lagrange Multiplier* ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai *Lagrange Multiplier* hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect* (Gujarati & Porter, 2015).

#### **3.4.3.4. Uji Statistik F (Keandalan Model)**

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak (Gujarati dan

Porter, 2015). Definisi layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Keputusan yang dapat diambil dari uji ini adalah dengan kriteria sebagai berikut

(1) Apabila nilai *prob. F* hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan ( ) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak.

(2) Apabila nilai *prob. F* hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Gujarati dan Porter, 2015).

#### **3.4.3.5. Uji Statistik T**

Uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi). Uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas. Keputusan yang dapat diambil dari uji t ini adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2015).

(1) Apabila nilai *prob. t* hitung (ditunjukkan pada *Prob.*) lebih kecil dari tingkat kesalahan ( ) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Apabila nilai *prob. t* hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Flypaper Effect*, dan Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Oportunistik Penyusun Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera. Ketiga sumber pendapatan ini menjadi komponen yang paling utama dalam pendanaan pembangunan daerah. PAD menjadi salah satu komponen utama dalam sumber pendanaan pembangunan pada daerah perkotaan, Dana Bagi Hasil menjadi salah satu komponen utama dalam sumber pendanaan pembangunan pada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan Dana Alokasi Umum secara umum menjadi basis utama dalam pendanaan pembangunan daerah. Dengan perubahan yang semakin meningkat pada ketiga komponen ini, maka penyusun anggaran mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang semakin besar pula, yaitu dengan cara mengalokasikannya kedalam belanja yang sesuai preferensi yang menguntungkan pihak tertentu.
2. Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Nilai Oportunistik Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera. SiLPA sebenarnya dapat dijadikan indikator efisiensi belanja pada pelaksanaan

program/kegiatan Pemerintah Daerah. Namun dengan adanya SiLPA juga mengindikasikan bahwa perencanaan program/kegiatan kurang akurat dalam perhitungan anggaran, maupun kurang tepat dalam menetapkan sarannya, sehingga APBD tidak dapat terserap secara maksimal dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

3. Tingkat oportunistik penyusun anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera berbeda-beda, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan nilai *individu effect* yang dimilikinya. Kabupaten/Kota dengan nilai *individu effect* positif berjumlah 129 Kabupaten/Kota, yang berarti dalam proses penyusunan anggaran terjadi oportunistik penyusun anggaran, sedangkan Kabupaten/Kota dengan nilai *individu effect* negatif berjumlah 21 Kabupaten/Kota, yang berarti dalam proses penyusunan anggaran tidak terjadi oportunistik penyusun anggaran. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umumnya, dalam dalam proses penyusunan anggaran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera terjadi oportunistik

## **5.2. Saran.**

1. Dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan peningkatan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan APBD. Oleh karena itu, guna menekan perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan *e-planning* dan *e-budgeting* dalam penyusunan APBD. Dengan *e-plannig* diharapkan aspirasi masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkannya dapat diakomodir

dengan baik, dan dengan *E-budgeting* yang menganut prinsip akuntabel dan transparansi, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam pengawasan dengan mengakses secara online data-data anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari APBD.

2. DPRD dapat memaksimalkan peran Musrenbangda bersama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat, tidak mempengaruhi program/kegiatan pembangunan daerah tertentu demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan meningkatkan pengawasan baik terhadap jalannya penganggaran maupun pelaksanaan program/kegiatan APBD.
3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 65,17%, menunjukkan bahwa masih terdapat 34,83% pengaruh variabel lain, yang dapat memberikan mampu penjelasan mengenai variasi variabel lain dari perilaku oportunistik penyusun anggaran, oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, komponen pembiayaan lainnya dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera sehingga tidak dapat dijadikan acuan secara nasional, penelitian yang sama dengan menggunakan populasi yang lebih besar akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Asmara, J.A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang 23-26 Agustus.
- Asmara, J.A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3*. No. 2 . Juli 2010 Hal. 155-172.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Sjøreide. 2001. *Corruption: A review of contemporary research*. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: <http://www.cmi.no>. Camarer, L. 1997. Poverty and corruption in South Africa: Government corruption in poverty alleviation programs. <http://www.gov.za/reports/1998/poverty/corruption.pdf>.
- Bartolini, D., and Santolini, R. (2007). Fiscal Rules and The Opportunistic Behaviour of The Incumbent Politician: Evidence From Italian Municipalities. *Working Paper*. Institute of Local Public Finance February 2007.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cioffi, M., Messina, G., and Tommasino, P. (2012). Parties, Institutions and Political Budget Cycles at Municipal Level: Evidence from Italy. *Working paper at Meeting of the Public Choice Society* Januari 2012.
- Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary Power, Rent-Seeking and Corruption. University Torino & ICER, Working Paper.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Deller, Steven, Craig S Maher, dan Victor Lledo (2007). Wisconsin Local Government, State Share Revenue and the Illusive Flypaper Effect. *J. Of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19 (2), 200-220. Summer 2007
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review* 14 (1): 57-74.
- Elias, R. Z. (2013). The Impact of Machiavellianism and Opportunism on Business Students' Love of Money. *Southwestern Business Administration Journal (SBAJ) Volume 13* Issue 1&2, 2013, pp.1-22.



- Faria, J.A., dan Silva, S.M.G. (2013) The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management vol 7(13)* ,pp.1086-1079.
- Florensia, T. M. (2009). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Garamfalvi, L. (1997). Corruption in The Public Expenditure Management Process. *Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference*, Peru 7-11 September.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS : Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. dan Porter, D.C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. dan Abdullah, (S. 2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1)*: 53-64.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics. Vol.3.No.4*.pp.305-360.
- Jogiyanto. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Jumaidi, L.T. (2014). Perilaku Legislatif dalam Praktik Penganggaran dengan Pendekatan Nilai – Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram Lombok 24 -27 September 2014*.
- Kamaliah, D., Edfan dan Viorita, V. (2010). Pengaruh Perilaku Oportunistik terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi Riau) *Jurnal Ekonomi Volume 18*, Nomor 2 Juni 2010.
- Keefer, P. and Khemani, S. (2003). The political economy of public expenditures. Background *paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2017), KPK : E-budgeting Bikin Daerah Sulit Main Anggaran. *CNN Indonesia*. September 2017
- Latifah, N.P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik ?. *Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010* : 85 – 94.
- Liza, N.B.A.Jamil. C.Z.M and Nor, N.A.M. 2013. Ethical Antecedents of Dysfunctional Behaviour in Performance Measurement and Control System. *Asian Social Science (9) 1*.

- Maimunah, Mutiara 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/ Kota di pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 2006.
- Magner, N. and G.G. Johnson. 1995. Municipal officials' reactions to justice in budgetary resource allocation. *Public Administration Quarterly*: 439-456.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria, F.T. (2009). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *E-Jurnal UGM*.
- Martinez, J.V., Arze, J. and Boex, J. (2004). Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management. *Working Paper*. Georgia State University. Retrieved from <http://www.fiscalreform.net>.
- Maryono, R. (2013). Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *E-Jurnal UNP*.
- Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Megasari, I.A.G.S (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *E-jurnal Unud*.
- Oktriniatmaja, R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *E-Journal Universitas Sebelas Maret*.
- Purwati, S.M. (2014) Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume 10 no 2 Tahun 2015*.
- Riharjo, I.B. dan Isnadi. (2010). Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif dalam Penyusunan APBD ( Bukti Empiris atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam). *Jurnal Ekuitas Vol.14 No. 3 September:388-410*.
- Ritonga, I.T. dan M.I. Alam. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Romarina, A. dan A. Makfatih. (2010). Faktor – Faktor Risiko Fiskal dan Penganggaran Daerah. *Jurnal BPPK Volume I*.
- Shah, Anwar. (2006) A Pratitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfer. *World Bank Policy Research Working paper 4039*, October 2006

- Sholikhah. (2014) Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*
- Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, R.W. and M. Bertozzi. (1998) Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*: 325-353.
- Suartana, I.W. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sujaie, A.F. (2013). Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena dalam Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos. *E-Journal UGM*.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. dan Istiqomah, A.E.(2014). Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram Lombok* 24 -27 September 2014.
- Suryarini, T. (2012). Perilaku Oportunistk Legialtaif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 1 April 2012*.
- Tanzi, V. and Davoodi, H. (2002). Corruption, public investment, and growth, Governance, Corruption, & Economic Performance. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Turnbull, G.K., (1998), "The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence", *Journal of Urban Economics*, 44(1), Juli: 126.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahyu Winarno, Wing (2009) *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Badan Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Wandira, Arbie Gugus.(2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Artikel online melalui <http://lib.unnes.ac.id>.
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Ekonosia, FE UII
- Wooldridge, J.M. (2005), *Introducing Econometric : A Modern Approach*, Addison Wesley, Boston